

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan distribusi pendapatan, dan meningkatkan hubungan ekonomi regional. Dalam teori pembangunan ekonomi regional, pertumbuhan ekonomi yang ideal seharusnya dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Namun realitanya, proses pembangunan seringkali menghadapi tantangan berupa ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Todaro (2000) mengemukakan bahwa perkembangan dan fase-fase pembangunan di suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari munculnya kesenjangan pembangunan antarwilayah. Ia juga menegaskan bahwa ketika pembangunan di suatu daerah berlangsung dengan intensitas yang berlebihan, akan muncul konsekuensi negatif yang lebih dominan dibandingkan dampak positifnya, yang kemudian menghasilkan ketimpangan dalam pola pembangunan antarwilayah (Noviar, 2021).

Menurut Sjafrizal (2008), ketimpangan pembangunan antarwilayah timbul dari beberapa faktor utama. Pertama, setiap daerah memiliki kandungan sumber daya alam yang berbeda-beda. Kedua, kondisi geografis dan lokasi tiap wilayah memiliki karakteristik yang tidak sama. Ketiga, pola distribusi barang dan jasa yang tidak merata antardaerah. Keempat, aktivitas ekonomi yang cenderung terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu. Kelima, adanya kesenjangan dalam alokasi anggaran pembangunan di berbagai



wilayah. Mengingat kompleksitas faktor-faktor tersebut, diperlukan perencanaan yang matang dan implementasi kebijakan pembangunan yang tepat sasaran untuk menekan tingkat kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Pulau Sulawesi, sebagai salah satu wilayah strategis di Indonesia, tidak luput dari permasalahan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Hal ini tercermin dari berbagai indikator ekonomi yang menunjukkan kesenjangan yang signifikan antarprovinsi di Sulawesi. Berdasarkan data BPS tahun 2024, terdapat disparitas PDRB yang sangat mencolok:

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk dan PDRB Perkapita Provinsi di Sulawesi Tahun 2024

Provinsi	Jumlah Penduduk (Jiwa)	PDRB Perkapita HB
Sulawesi Utara	2.701.790	58.538.133
Gorontalo	1.227.794	44.311.500
Sulawesi Tengah	3.121.800	143.116.461
Sulawesi Selatan	9.463.390	62.463.500
Sulawesi Barat	1.503.232	42.450.000
Sulawesi Tenggara	2.793.070	61.901.470

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya dengan peningkatan produksi, yang diukur melalui produk domestik bruto (PDB) di tingkat nasional dan produk domestik regional bruto (PDRB) di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Kedua indikator ini saling terkait, karena perkembangan ekonomi nasional akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi. Ketika ekonomi nasional tumbuh, biasanya hal ini akan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di daerah (Nurbayani et al., 2024).



Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah, antara PDRB perkapita menunjukkan rata-rata tingkat kesejahteraan

penduduk di wilayah tersebut. Ketimpangan wilayah, yang dapat diukur melalui perbedaan PDRB perkapita antardaerah, menjadi perhatian penting dalam pembangunan ekonomi regional. Ketimpangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan sumber daya alam, infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan tingkat investasi.

Berdasarkan data tahun 2024 pada Tabel 1.1, kondisi perekonomian di wilayah Sulawesi menunjukkan adanya variasi yang cukup signifikan antar provinsi. Sulawesi Selatan tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu 9.463.400 jiwa, sementara Gorontalo memiliki populasi terkecil dengan 1.227.800 jiwa. Total keseluruhan penduduk Sulawesi mencapai 20.811.100 jiwa. Dari sisi PDRB perkapita, Sulawesi Tengah memimpin dengan nilai 143.116.461 rupiah, menunjukkan tingkat kesejahteraan rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Di sisi lain, Sulawesi Barat mencatatkan PDRB perkapita terendah sebesar 42.450.000 rupiah, mengindikasikan adanya kesenjangan ekonomi yang perlu menjadi perhatian.

Ketimpangan ekonomi antar provinsi di Sulawesi terlihat jelas dari selisih PDRB perkapita tertinggi dan terendah yang mencapai 100.666.461 rupiah. Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan menunjukkan kondisi perekonomian yang lebih baik, sementara Sulawesi Barat dan Gorontalo masih memerlukan upaya pembangunan yang lebih intensif. Kondisi ini mengisyaratkan perlunya kebijakan pembangunan yang lebih merata, dengan fokus khusus pada pengembangan wilayah tertinggal. Strategi pembangunan yang dapat diterapkan meliputi peningkatan konektivitas antarwilayah, pengembangan ekonomi lokal, dan penguatan infrastruktur di setiap provinsi. Dengan demikian, diharapkan kesenjangan ekonomi antar provinsi di Sulawesi dapat



dikurangi secara bertahap, menuju pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak hanya ditentukan dari sisi *supply*, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sisi *demand* yaitu tingkat investasi yang masuk. Investasi menjadi kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana pemerintah terus mendorong peningkatan investasi untuk mencapai target pertumbuhan yang diharapkan. Ketika investasi masuk dalam jumlah besar, aktivitas ekonomi akan meningkat melalui pembangunan berbagai sektor usaha dan infrastruktur. Masuknya investasi membawa dampak berantai yang positif. Ketika investasi digunakan untuk pengembangan sektor produksi dan jasa, lapangan kerja baru akan tercipta. Hal ini memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan mendorong pemerataan ekonomi. Namun, ketika investasi tidak tersebar merata antarwilayah, akan muncul kesenjangan dimana daerah dengan investasi besar berkembang pesat, sementara daerah dengan investasi rendah cenderung tertinggal. Kondisi ini menciptakan ketimpangan ekonomi yang semakin melebar antarwilayah (Nurfifah et al., 2022).

Selain investasi, peran pemerintah yang tercermin dalam pengeluaran merupakan faktor penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat. Semakin besar pengeluaran pemerintah, maka dampaknya akan semakin positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pengeluaran pemerintah dapat berfungsi sebagai suntikan

perekonomian melalui program-program atau kegiatan yang mendorong aktivitas sumber daya yang ada, sehingga dapat mengurangi tingkat



ketimpangan pembangunan yang terjadi dalam suatu wilayah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, salah satu tujuan dari desentralisasi adalah untuk mengoreksi ketidakseimbangan horizontal, yaitu memperkecil disparitas antardaerah melalui mekanisme block grant/transfer dan memberikan kewenangan lebih kepada daerah untuk menerapkan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan sumber daya yang ada. Dengan adanya desentralisasi, daerah memiliki kewenangan dalam menentukan pengeluaran pemerintah daerah yang tercantum dalam APBD. Sesuai dengan peran pemerintah dalam perekonomian, yang mencakup peran stabilisasi, alokasi, distribusi, dan dinamisasi, pengeluaran pemerintah daerah harus didasarkan pada peran-peran tersebut (Mansyur et al., 2021).

Seperti yang diungkapkan oleh Sjafrizal (2008), untuk mengatasi ketimpangan pembangunan, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, mendorong transmigrasi dan migrasi spontan, serta membangun pusat-pusat pertumbuhan baru di daerah berskala kecil. Kebijakan fiskal wilayah juga diperlukan untuk mendukung penyelesaian masalah ketimpangan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ketimpangan, diperlukan pengeluaran pemerintah daerah yang terkoordinasi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja modal merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah dengan menambah aset tetap atau kekayaan pemerintah yang manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan dan



transportasi. Tersedianya fasilitas pelayanan publik membuat masyarakat akan lebih aktif dan bergairah dalam bekerja serta dengan adanya fasilitas yang baik akan meningkatkan jumlah investasi di masing-masing daerah yang akan mampu mempercepat pembangunan ekonomi sehingga akhirnya akan mengurangi tingkat ketimpangan yang ada (Putri & Natha, 2014).

Dana yang peroleh pemerintah daerah secara garis besar digunakan untuk membiayai belanja pemerintah. Namun setelah adanya sistem anggaran berdasarkan permendagri No.13 tahun 2006, belanja daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari kegiatan pembuatan jalan, kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional, kegiatan pendidikan dan pelatihan serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah yang telah dianggarkan. Sedangkan belanja tidak langsung adalah bagian dari belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tidak langsung terdiri dari: belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi, kabupaten/kota dan desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga lainnya (Alfurqani et al., 2021).

Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan berpengaruh besar terhadap kinerja ekonomi. Dengan demikian, peningkatan kualitas manusia dalam pembangunan dapat membantu mengurangi ketimpangan. Tingginya tingkat



pembangunan manusia akan berimbas pada ekonomi melalui peningkatan kemampuan dan kapabilitas masyarakat.

Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, misalnya, berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan. Hal ini akan menghasilkan individu yang lebih terampil dan berpendidikan, yang pada gilirannya dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian. Di sisi lain, pengeluaran untuk sektor kesehatan akan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, yang penting untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas.

Sumber daya manusia juga merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Jika suatu provinsi mempunyai keterbatasan sumber daya alam, tetapi mampu memiliki kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, maka provinsi tersebut dapat meningkatkan produktivitas serta mendorong pembangunan ekonomi sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila suatu wilayah dapat meningkatkan pendapatan per kapita, sehingga pertumbuhan ekonominya pun meningkat. Kualitas sumber daya manusia, yang dikenal sebagai indeks pembangunan manusia, berpengaruh besar terhadap tingkat produktivitas penduduk. Semakin rendah indeks pembangunan manusia, maka tingkat produktivitas yang rendah dapat berpengaruh pada rendahnya pendapatan. Sebaliknya, semakin tinggi indeks pembangunan manusia, maka akan semakin tinggi tingkat produktivitas penduduk yang kemudian mendorong tingkat pendapatan serta PDRB yang semakin tinggi. Salah satunya adalah bahwa indeks pembangunan manusia pada tiap



daerah itu juga berbeda, keadaan ini juga disebut perbedaan kondisi demografis. Hal ini menjadikan indeks pembangunan manusia salah satu faktor yang berpengaruh pada ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah (Azim et al., 2022).

Dengan adanya sinergitas antara investasi, belanja modal, indeks kesehatan dan indeks pendidikan, pengambil kebijakan dapat mengoptimalkan strategi pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Hal ini yang kemudian akan mendukung terciptanya pembangunan yang lebih merata dan inklusif, serta mengurangi ketimpangan wilayah secara sistematis dan terukur.

Oleh karena itu, Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Determinan Ketimpangan Wilayah Di Sulawesi”**. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan wilayah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah provinsi yang ada di Sulawesi?
2. Apakah investasi berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah provinsi di Sulawesi?
3. Apakah indeks kesehatan berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah provinsi di Sulawesi?
4. Apakah indeks pendidikan berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah provinsi di Sulawesi?



provinsi di Sulawesi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka disajikan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap ketimpangan wilayah provinsi yang ada di Sulawesi.
2. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap ketimpangan wilayah provinsi di Sulawesi.
3. Untuk mengetahui pengaruh indeks kesehatan terhadap ketimpangan wilayah provinsi di Sulawesi.
4. Untuk mengetahui pengaruh indeks pendidikan terhadap ketimpangan wilayah provinsi di Sulawesi.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat 2 manfaat dalam penelitian ini, yakni secara teoritis dan praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan dan ekonomi regional. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah dengan memberikan bukti empiris baru dari konteks Sulawesi. Hasil penelitian dapat menjadi referensi akademis yang berharga bagi penelitian-penelitian selanjutnya, terutama dalam mengkaji hubungan antara investasi, belanja modal, indeks kesehatan dan indeks pendidikan



terhadap ketimpangan wilayah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Kalangan akademisi, dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi dan kajian literatur untuk penelitian selanjutnya yang bertemakan ketimpangan wilayah.
2. Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan yang berharga dalam perumusan kebijakan pembangunan dan program pengurangan ketimpangan wilayah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Ketimpangan Wilayah

Menurut Sjafrizal (2008), ketimpangan wilayah merujuk pada keadaan suatu daerah yang disebabkan oleh perbedaan dalam kandungan sumber daya alam serta kondisi demografi di masing-masing wilayah. Variasi dalam kandungan sumber daya alam di berbagai daerah secara signifikan memengaruhi aktivitas produksi di daerah tersebut.

Mubyarto (1995) menyebutkan bahwa ketimpangan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: ketimpangan antar sektor, yaitu perbedaan antara sektor industri dan sektor pertanian, ketimpangan antardaerah, yang terjadi akibat perbedaan sumber daya yang dimiliki, dan ketimpangan antargolongan ekonomi. Ketimpangan antarwilayah yang disebabkan oleh perbedaan kandungan sumber daya alam dan kondisi demografi di setiap wilayah menghasilkan kemampuan yang berbeda dalam mendorong proses pembangunan. Akibatnya, muncul wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*underdeveloped region*).

Ketimpangan pembangunan antarwilayah pertama kali disampaikan oleh Douglas C. North (Sjafrizal, 2008) dalam analisisnya tentang Teori Pertumbuhan Neo-Klasik. Sebuah prediksi diajukan mengenai hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan antarwilayah. Metode Neo-Klasik



beranggapan bahwa mobilitas faktor produksi, baik sumber daya yang dimiliki, modal, maupun tenaga kerja, pada awal proses pembangunan kurang lancar. Akibatnya, modal dan tenaga ahli cenderung terpusat di daerah yang maju, sehingga disparitas pembangunan cenderung melebar. Namun, jika proses pembangunan terus berlanjut dengan semakin baiknya prasarana dan fasilitas komunikasi, mobilitas modal dan tenaga kerja akan semakin lancar. Ketika negara tersebut telah maju, ketimpangan pembangunan regional diharapkan akan berkurang. Hipotesis ini kemudian dikenal sebagai Hipotesis Neo-Klasik. Dalam hipotesis ini, ketimpangan pembangunan pada awal proses cenderung meningkat. Proses ini akan berlangsung hingga ketimpangan tersebut mencapai titik puncak, jika proses pembangunan terus berlanjut, ketimpangan pembangunan antarwilayah tersebut akan menurun secara bertahap (Dewi et al., 2021).

Ketimpangan wilayah ditandai dengan adanya daerah yang lebih maju dan daerah yang terbelakang. Permasalahan ketimpangan menjadi isu serius dalam beberapa tahun terakhir ini karena beberapa negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat justru menghadapi ketimpangan antarwilayah yang semakin besar, hal ini terjadi karena dalam proses pembangunan terdapat perbedaan faktor-faktor produksi yang dimiliki setiap wilayah, dimana ada wilayah dengan Sumber Daya Alam (SDA) melimpah, namun minim Sumber Daya Manusia (SDM). Sebaliknya ada wilayah dengan SDA terbatas, tetapi memiliki SDM yang berlimpah. Kondisi ini kemudian



mengakibatkan perbedaan dalam perkembangan pembangunan yang menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan kesejahteraan di tiap wilayah menjadi lebih stabil. Hal inilah yang selanjutnya akan mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah karena wilayah tersebut memiliki potensi untuk berkembang (Mansyur, 2021).

Ketimpangan wilayah merupakan fenomena kompleks yang memiliki dampak mendalam pada struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut Todaro (2006) dalam (Kurniasih, 2013), ketimpangan ekstrim dapat mengakibatkan sejumlah permasalahan serius, seperti inefisiensi ekonomi dan alokasi sumber daya yang tidak proporsional. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga melemahkan stabilitas sosial, mengurangi solidaritas antarkelompok masyarakat, dan memperkuat dominasi kelompok kaya yang pada gilirannya menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat. Dalam penelitian yang sama disebutkan Armstrong & Taylor (1993) lebih lanjut menekankan bahwa ketimpangan wilayah yang signifikan akan menimbulkan konsekuensi sosial yang kompleks. Perbedaan standar hidup yang tajam akan memicu ketidakpuasan mendalam, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran dan menciptakan beban ekonomi tambahan bagi daerah yang sedang berkembang. Dampak ketimpangan ini tidak sekadar bersifat ekonomis, melainkan juga menyentuh dimensi psikologis dan struktural masyarakat.

Fenomena hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan



ketimpangan pendapatan pertama kali diperkenalkan oleh Simon Kuznet tahun 1955. Kuznets mengemukakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk. Namun, distribusi pendapatan akan membaik seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita, membentuk kurva U terbalik. Pada fase awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi sering kali terfokus pada sektor modern dan terpusat di daerah yang sudah berkembang. Dengan kata lain, wilayah yang lebih maju mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang baru mulai berkembang. Di negara-negara berkembang, di mana sektor pertanian masih dominan, ketimpangan pendapatan relatif rendah. Namun, ketika industrialisasi mulai terjadi, ketimpangan tersebut justru meningkat (Purwanti & Setyari, 2021).

Ketimpangan wilayah memerlukan pengukuran yang akurat untuk menganalisis seberapa serius ketimpangan/kesenjangan yang ada di suatu daerah. Berbagai metode analisis dapat dimanfaatkan sebagai alat ukur untuk menilai tingkat ketidakmerataan pembangunan antardaerah. Dengan menggunakan instrumen-instrumen pengukuran yang tepat, tingkat disparitas antarwilayah dapat dipetakan dan dievaluasi secara objektif, sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih merata. Alat analisis yang digunakan untuk pengukuran ketimpangan wilayah ialah:

a) Indeks Williamson

Indeks Williamson merupakan alat ukur yang menggambarkan tingkat ketimpangan antarwilayah dalam skala 0 hingga 1.



Interpretasi nilainya bersifat proposional yakni ketika nilai indeks mendekati nol, hal ini mengindikasikan penurunan kesenjangan wilayah dan menunjukkan distribusi pembangunan yang semakin merata. Semakin rendah angka indeks, maka kondisi pembangunan wilayah semakin seimbang dan terdistribusi dengan baik. Sebaliknya, apabila nilai indeks semakin mendekati angka 1, maka hal tersebut menandakan ketimpangan antarwilayah yang semakin signifikan. Semakin tinggi Indeks Williamson, berarti ketimpangan antarwilayah semakin melebar dan tidak merata (Ryansyah et al., 2023).

b) Indeks Theil

Dalam menganalisis ketimpangan dalam wilayah dan antarwilayah, Indeks Theil merupakan salah satu alat ukur yang umum digunakan. Untuk menghitung indeks ini diperlukan variabel yang serupa dengan Indeks Williamson, yakni data PDRB per kapita tiap wilayah serta jumlah penduduknya. Interpretasi hasil pengukurannya pun memiliki pola yang identik, jika nilai indeks yang mendekati 1 mengindikasikan ketimpangan yang tinggi, sementara nilai yang mendekati 0 menunjukkan distribusi pembangunan yang lebih merata. Indeks Theil tidak memiliki batas atas sehingga angka Indeks Theil dapat melebihi dari satu (Sjafrizal, 2008).

2.1.2 Investasi



Berdasarkan kajian Cussoy (2024), investasi dapat dipahami sebagai suatu bentuk pengeluaran modal yang dilakukan oleh

perusahaan atau investor untuk pengadaan berbagai aset produktif. Investasi ini mencakup pembelian barang-barang modal dan berbagai perlengkapan produksi yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa dalam sistem perekonomian, sebagaimana dijelaskan Sukirno (2005). Sementara itu, Samuelson dan William (1992) memaparkan bahwa investasi merupakan pengeluaran yang dilakukan investor dalam penggunaan sumber daya seperti peralatan, gedung, mesin-mesin produksi baru, serta persediaan, dengan harapan memperoleh keuntungan dari aktivitas investasi tersebut.

Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (fixed asset) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada



kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Investasi dalam pembangunan wilayah adalah motor penggerak kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan-lapangan kerja baru yang sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Investasi memiliki peran penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan pemerataan pendapatan dan lapangan kerja. Perbedaan akumulasi kapital atau investasi disuatu wilayah akan mendorong perbedaan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan wilayah. Ketimpangan antarwilayah dapat dihindari dengan pengembangan investasi yang difokuskan pada sektor-sektor basis yang memiliki efek pengganda besar dalam pembangunan (Hidayah et al., 2022).

Investasi atau penanaman modal yaitu ketika perusahaan mengeluarkan sejumlah dana yang tujuannya adalah untuk meningkatkan modal serta mengambil keuntungan pada waktu yang telah ditetapkan. Dalam investasi terdapat dua macam lainnya yang meliputi investasi dari pemerintahan dan investasi swasta.

Untung (2024) menjelaskan bahwa keuntungan merupakan motivasi utama para investor dalam melakukan investasi modal. Hal ini perlu diselaraskan dengan kepentingan negara penerima investasi



yang bertujuan mencapai target pembangunan nasionalnya. Untuk mengarahkan investasi sesuai prioritas pembangunan, pemerintah berkewajiban menyediakan berbagai infrastruktur dan fasilitas pendukung. Sebagai konsekuensinya, diperlukan perencanaan yang matang dari pihak pemerintah, termasuk penetapan kebijakan implementasi serta sistem pengawasan yang efektif. Langkah ini penting untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan nasional. Melalui pendekatan tersebut, aktivitas investasi dapat diarahkan sesuai dengan prioritas program pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan pola pendekatan seperti ini, konsep pembangunan dapat dipandang sebagai sebuah proses kolaboratif yang saling menguntungkan. Hal ini menepis anggapan bahwa pembangunan menciptakan ketergantungan atau konflik kepentingan antara investor dan negara penerima modal.

Fatihuddin (2019) menjelaskan jenis-jenis investasi ialah sebagai berikut:

a. Investasi Otonom (*Autonomous investment*)

Merupakan bentuk investasi yang nilainya tidak terpengaruh oleh fluktuasi pendapatan, melainkan ditentukan oleh faktor-faktor eksternal seperti kemajuan teknologi, kebijakan pemerintahan, dan prospek bisnis. Misalnya, ketika ada terobosan teknologi militer, negara akan tetap berinvestasi di bidang pertahanan, atau program elektrifikasi pedesaan yang terus berjalan tanpa memandang perubahan GNP.



b. Investasi Terimbas (*Induced investment*)

Tipe investasi yang memiliki hubungan langsung dengan tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar pula kemungkinan investasi dilakukan, menunjukkan adanya korelasi positif antara keduanya.

c. Investasi Publik (*Public investment*)

Aktivitas penanaman modal yang dijalankan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan fokus utama menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

d. Investasi Swasta (*Private investment*)

Kegiatan investasi yang dilaksanakan oleh pihak non-pemerintah, di mana prospek keuntungan masa depan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan besaran investasi.

e. Investasi Dalam Negeri (*Domestic investment*)

Penanaman modal yang dilakukan oleh investor lokal atau domestik dalam teritorial negara sendiri.

f. Investasi Luar Negeri (*Foreign investment*)

Bentuk penanaman modal yang berasal dari investor asing, umumnya masuk ke negara yang memiliki sumber daya alam dan manusia melimpah namun terkendala keterbatasan modal.

g. *Gross investment*

Nilai total investasi yang diperoleh dari penjumlahan antara investasi otonom dan investasi terimbas.

h. *Net Investment*

Perhitungan nilai investasi yang telah mempertimbangkan faktor



depresiasi atau penyusutan dalam aktivitas investasi tersebut.

2.1.3 Belanja Modal

Aktivitas pengeluaran pemerintah mencakup pembiayaan infrastruktur dan pembayaran gaji pegawai yang bertujuan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan pemerintah daerah menjadi sorotan utama karena dituntut adanya transparansi dalam penggunaannya.

Dalam konteks ekonomi makro daerah, indikator pertumbuhan ekonomi dapat diamati melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasar pada pendekatan Keynes, peningkatan pendapatan dipengaruhi oleh kenaikan permintaan yang tercermin dalam beberapa komponen utama, yaitu tingkat konsumsi, pengeluaran pemerintah, kegiatan investasi, serta aktivitas ekspor dan impor (Koilam et al., 2023).

Belanja modal merupakan salah satu bagian dari pengeluaran pemerintah daerah. Belanja modal termasuk:

1. Belanja tanah;
2. Belanja peralatan dan mesin;
3. Belanja modal gedung dan bangunan;
4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
5. Belanja aset tetap lainnya;
6. Belanja aset lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 pasal 53 ayat 1: belanja modal sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 50 huruf (c) digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010, Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Menurut Halim (2013;229) Belanja Modal yaitu salah satu kelompok dari belanja daerah yang digunakan dalam pembelian dan penyediaan barang berwujud memiliki daya guna satu tahun lebih yang dipergunakan dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik (Defitri, 2020).

2.1.4 Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan berasal dari Angka Harapan Hidup (AHH), yang merupakan perkiraan rata-rata tahun yang bisa dijalani seseorang. Indikator ini sering dipakai untuk menilai seberapa baik pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam kesehatan. Jika AHH semakin tinggi, itu menunjukkan bahwa kualitas fisik penduduk di daerah tersebut juga semakin baik (BPS Kabupaten Bantaeng 2017).



5 Indeks Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu aspek terpenting dalam

pengembangan sumber daya manusia dan dianggap sebagai kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut Andrew E. Sikula dalam (Dewi et al., 2016), tingkat pendidikan merupakan proses yang berlangsung lama dengan prosedur yang sistematis dan terorganisir. Di sini, tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konsep dan teori untuk mencapai tujuan umum (SIS Dai 2023).

Pendidikan tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Pentingnya pendidikan juga tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan menjadi salah satu cita-cita nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah juga mengupayakan berbagai program dalam meningkatkan pendidikan salah satunya program wajib belajar 9 tahun. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pendidikan masyarakat adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS merupakan banyaknya jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh seluruh jenjang pendidikan yang pernah dijalani (Amin, 2017).

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Investasi dengan Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan dapat terjadi sebagai konsekuensi dari pola investasi, baik yang berasal dari sektor pemerintah maupun swasta. Fenomena ini muncul karena adanya kecenderungan investor swasta yang mengkonsentrasikan modalnya pada wilayah-wilayah tertentu,



sementara wilayah lain mengalami minimnya arus investasi. Para investor, baik domestik maupun asing, cenderung menerapkan pendekatan selektif dalam memilih lokasi investasi dengan mengutamakan wilayah yang menawarkan potensi keuntungan lebih tinggi dan kepastian pengembalian investasi yang lebih terjamin. Pola investasi yang tidak merata ini mengakibatkan beberapa wilayah mengalami stagnasi dalam hal penerimaan modal investasi, sehingga menciptakan ketimpangan ekonomi yang semakin melebar antardaerah (Hasanah, 2023).

Hasil penelitian yang dilakukan Nurfifah (2022) menunjukkan bahwa variabel investasi berpengaruh positif terhadap tingkat ketimpangan dan signifikan secara statistik, maka ini berarti bahwa investasi mengalami peningkatan maka ketimpangan wilayah akan mengalami peningkatan. Seperti halnya di provinsi Sulawesi utara terlebih khusus kota-kota yang ada sedang mengalami perkembangan seperti kota manado sektor jasa dan pariwisata, kenaikan permintaan akan mendorong pendapatan dan permintaan, yang selanjutnya menaikkan investasi. Di daerah lainnya dimana perkembangan sangat lamban seperti Kota Bitung, Kota Tomohon dan Kota Kotamobagu, maka permintaan terhadap modal untuk investasi adalah rendah sebagai akibat dari rendahnya penawaran modal dan pendapatan yang cenderung makin rendah. Dengan perbedaan perkembangan tersebut dan terkonsentrasinya investasi didaerah yang mapan mengakibatkan terjadinya ketimpangan.



2.2.2 Hubungan Belanja Modal dengan Ketimpangan Wilayah

Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah dimana penelitian yang Akita dan Miyata (2017) menyebut ada perbedaan aktifitas ekonomi dan ketersediaan infrastruktur di daerah sebagai penyebab ketimpangan. Dengan demikian, intervensi pemerintah dalam perekonomian yang bersifat masif dalam skala nasional sangat diperlukan, yang dilakukan dengan pengeluaran belanja modal dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana infrastuktur (Yasni & Yulianto, 2020).

Seperti yang diutarakan oleh Sjafrizal (2008), bahwa dalam mengatasi ketimpangan pembangunan dapat dilakukan dengan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, mendorong transmigrasi dan migrasi spontan, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan yang baru di daerah yang berskala kecil, dan kebijakan fiskal wilayah yang mendukung penyelesaian masalah ketimpangan. Maka dalam upaya penyelesaian masalah ketimpangan tersebut diperlukan pengeluaran pemerintah daerah yang sudah terkoordinir yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah yang berskala kecil.

Selain itu Sukirno (2002) dalam (Noto, 2016) juga menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan. Peran pemerintah melalui pengeluaran pemerintah merupakan faktor penting dalam meningkatkan



kesejahteraan masyarakat melalui permintaan agregat. Semakin besar pengeluaran pemerintah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang baik pada daerah tersebut. Pengeluaran pemerintah melalui program-program untuk mendorong produktivitas sumber daya akan menjadi suntikan perekonomian, namun ketika besaran pengeluaran pemerintah tidak merata maka akan menyebabkan peningkatan ketimpangan antarwilayah.

2.2.3 Hubungan Indeks Kesehatan dengan Ketimpangan Wilayah

Ketika masyarakat di suatu daerah memiliki kesehatan yang baik, mereka bisa bekerja lebih produktif. Orang yang sehat dapat bekerja lebih lama, jarang absen karena sakit, dan memiliki energi lebih untuk bekerja dengan baik. Sebaliknya, di daerah dengan tingkat kesehatan rendah, banyak orang tidak bisa bekerja maksimal karena sering sakit.

World Health Organization (WHO) memaknai sehat sebagai suatu kondisi dimana seseorang memiliki kesejahteraan pada kondisi fisik, mental, maupun keadaan sosialnya yang menjadikan individu tersebut mampu untuk dapat hidup dengan tingkat produktif yang tergolong baik dari segi sosial maupun secara ekonomi (Bintang & Woyanti, 2018). Mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehat didefinisikan sebagai suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Thahir et al., 2021). Rendahnya kondisi tingkat kesehatan yang dimiliki masyarakat dapat menyebabkan rendahnya tingkat



produktivitas yang timbul karena tidak dimilikinya kemampuan untuk bekerja oleh masyarakat (Chairunnisa & Qintharah, 2022). Dengan demikian masyarakat tidak bisa mendapatkan penghasilan yang disebabkan tidak mampu bekerja sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya yang berakibatkan pada kemiskinan. Seseorang yang memiliki tingkat produktivitas yang tinggi dapat keluar dari jeratan masalah kemiskinan dengan kesejahteraan yang dimiliki lebih baik (Aryanti 2024).

2.2.4 Hubungan Indeks Pendidikan dengan Ketimpangan Wilayah

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk menjamin dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara ekonomi dan sosial, serta sebagai salah satu cara mengatasi kesenjangan dalam upaya mencapai kesetaraan dan mewujudkan kehidupan yang makmur (Bustomi 2012). Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah indeks pendidikan. Indeks pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain indeks pendidikan, komponen penyusun IPM adalah Indeks Kesehatan dan Indeks Pengeluaran. IPM lebih komprehensif dalam mengukur tingkat keberhasilan dari proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dibandingkan dengan indikator Pendapatan Domestik Bruto/ Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDB/PDRB) yang hanya mencakup aspek ekonomi saja (Mahendra 2016).



2.3 Studi Empiris

(Mansyur et al., 2021) dalam penelitiannya mengukur dan menganalisa pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Temuan dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Pengeluaran pemerintah dapat memberikan pengaruh yang bermakna dengan rendahnya ketimpangan pembangunan wilayah di Sulawesi Selatan

Penelitian yang dilakukan Anin Nabail Azim et al. (2022) yang mengkaji determinan ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Indonesia. Analisis dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung Indeks Williamson sebagai indikator ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan data panel statistik dengan model Fixed Effect Model (FEM). Penelitian ini menjelaskan bahwa indeks pembangunan manusia secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan antarwilayah. Infrastruktur jalan yang merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah dan investasi asing berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan antarwilayah.

Penelitian yang dilakukan Ade Tiara Sukmawati dan Mulyo Hendarto bertus dimana penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, aglomerasi industri, Penanaman Modal Dalam Negeri



(PMDN), pengeluaran pemerintah, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan wilayah di Wilayah Kedungsepur tahun 2011-2020. Tingkat ketimpangan wilayah dihitung dengan menggunakan Indeks Entropi Theil. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi Generalised Least Square (GLS) dengan model fixed effect. Data yang digunakan adalah data panel yang meliputi cross section 6 kabupaten/kota di wilayah Kedungsepur dan time series dari tahun 2011-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, aglomerasi industri, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Wilayah Kedungsepur. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan Kedungsepur.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Islami & SBM, 2018) dengan judul Faktor-Faktor Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dimana penelitian ini menggunakan Indeks Williamson untuk mengukur ketimpangan wilayah, Analisis regresi linear berganda (Ordinary Least Square) dengan waktu penelitian tahun 2001-2015. Penelitian ini menggunakan software Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur cenderung meningkat dengan nilai Indeks Williamson lebih dari 1. Hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini ada tiga variabel yang hasilnya signifikan dan berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah yaitu variabel investasi, angkatan dan IPM serta dua variabel yang tidak signifikan yaitu variabel imbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah.



Penelitian yang dilakukan Harahap (2022) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Indeks pembangunan manusia, terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data panel yaitu gabungan time series dan cross section dari tahun 2014-2018 dengan jumlah sampel sebanyak 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Variabel yang digunakan adalah Ketimpangan Pendapatan (Y), Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, investasi dan IPM secara simultan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan secara parsial hanya IPM yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Model regresi data panel yang digunakan adalah *Random Effect Model* (REM).

Chusainy (2023) dalam penelitiannya untuk mengetahui seberapa besar ketimpangan pendapatan dan pengaruh belanja modal, inflasi, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di wilayah Bakorwil V Jawa Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Bappeda, dan Djpk.Kemenkeu. Dalam penelitian ini, dua metode digunakan, yaitu indeks entropi Theil untuk mengukur ketimpangan pendapatan dan regresi data panel untuk menentukan bagaimana variabel dependen mempengaruhi variabel independen. Hasil indeks entropi Theil menunjukkan bahwa kabupaten dan kota di wilayah Bakorwil V Jawa Timur memiliki rata-rata ketimpangan antara

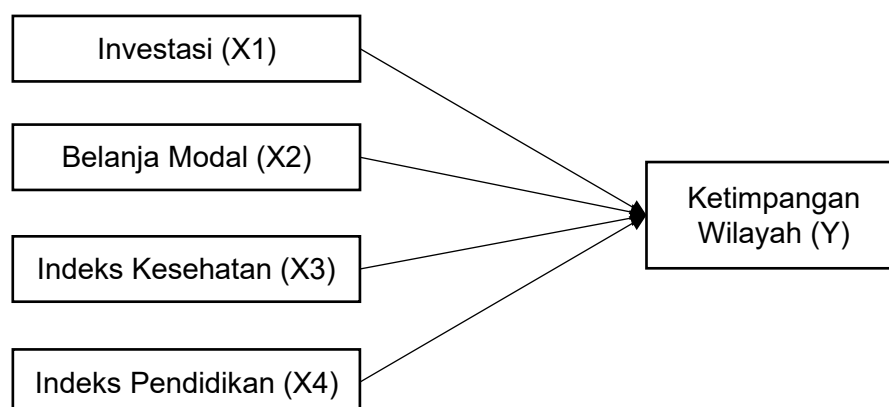


0,97-0,98. Hasil regresi data panel menemukan bahwa terdapat 2 variabel yang berpengaruh signifikan dan 1 variabel yang tidak berpengaruh signifikan. Variabel yang berpengaruh negatif dan signifikan adalah Belanja Modal dan Inflasi, sedangkan yang tidak signifikan adalah Indeks Pembangunan Manusia.

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka disusun kerangka konseptual dengan variabel independen ialah investasi (X1), belanja modal (X2), indeks kesehatan (X3) dan indeks pendidikan (X4), sedangkan variabel dependen ketimpangan wilayah (Y1) provinsi di Pulau Sulawesi.

Variabel ini adalah faktor penting yang mempengaruhi kondisi ketimpangan wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi referensi dan memberikan informasi baru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah Provinsi di Pulau Sulawesi. Berikut adalah kerangka konseptual dari penelitian ini.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian

Intisari Penelitian

Berdasarkan latar belakang, tinjauan teoritis, dan kerangka pemikiran, hipotesis atau dugaan sementara dalam penelitian ini adalah sebagai



berikut:

1. Diduga investasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah provinsi di Pulau Sulawesi.
2. Diduga belanja modal berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah provinsi di Pulau Sulawesi.
3. Diduga indeks kesehatan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah provinsi di Pulau Sulawesi.
4. Diduga indeks pendidikan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah provinsi di Pulau Sulawesi.

